

DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)**I. IDENTITAS SEKOLAH**

- A. Nama Sekolah : SMA Negeri 2 Salatiga
- B. MATA PELAJARAN : Pendidikan Pancasila
- C. KELAS / SEMESTER : XI (Sebelas) / Ganjil
- D. MATERI POKOK : Pemisahan Kekuasaan (Trias Politika Modifikasi)
- E. ALOKASI WAKTU : 4 x 45 menit (2 Pertemuan)

II. CAPAIAN PEMBELAJARAN (TUJUAN PEMBELAJARAN)

Setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran yang mendalam dan bermakna melalui model Discovery Learning, peserta didik diharapkan mampu:

- A. Menganalisis secara kritis dan mendalam konsep dasar pemisahan kekuasaan (Trias Politika) yang dicetuskan oleh para pemikir klasik, memahami esensi serta latar belakang historis kemunculannya sebagai pilar demokrasi modern. Peserta didik diharapkan tidak hanya sekadar menghafal definisi, namun mampu mengelaborasi implikasi filosofis dan praktis dari gagasan tersebut dalam konteks tata kelola negara.
- B. Mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan fundamental antara konsep pemisahan kekuasaan murni (separation of powers) dan pembagian kekuasaan (distribution of powers), serta mengaitkannya dengan dinamika praktik penyelenggaraan negara di berbagai belahan dunia, khususnya Indonesia. Peserta didik diharapkan mampu membedakan nuansa teoretis dan implementatif dari kedua konsep ini.
- C. Mengevaluasi secara komprehensif implementasi Trias Politika yang telah dimodifikasi dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peserta didik diharapkan mampu menguraikan bagaimana kekuasaan negara di Indonesia tidak hanya dipisahkan secara struktural, namun juga saling mengawasi dan menyeimbangkan (checks and balances) dalam sebuah sistem yang kompleks dan dinamis. Hal ini mencakup pemahaman peran dan fungsi lembaga-lembaga negara utama seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga-lembaga independen lainnya yang turut berkontribusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.
- D. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk menganalisis isu-isu kontemporer terkait dengan praktik pemisahan kekuasaan di Indonesia, seperti potensi tumpang tindih kewenangan, efektivitas pengawasan antarlembaga, serta tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Peserta didik diharapkan mampu menyajikan argumen yang logis dan berdasar data dalam menanggapi permasalahan-permasalahan tersebut.

- E. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya prinsip pemisahan kekuasaan sebagai fondasi utama bagi tegaknya supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan demi terwujudnya negara demokratis yang berkeadilan. Peserta didik diharapkan memiliki komitmen untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab dalam mengawal praktik bernegara yang sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.

III. MODEL PEMBELAJARAN

Discovery Learning

Model Discovery Learning dipilih karena sangat relevan untuk memfasilitasi Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) pada materi Pemisahan Kekuasaan. Model ini mendorong peserta didik untuk secara aktif menemukan konsep dan prinsip melalui serangkaian pengalaman belajar yang terstruktur, bukan sekadar menerima informasi secara pasif. Peserta didik diajak untuk mengamati, merumuskan masalah, mengumpulkan dan mengolah data, hingga menarik kesimpulan sendiri. Pendekatan ini secara inheren mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kemampuan memecahkan masalah, yang merupakan inti dari pembelajaran mendalam. Dengan terlibat langsung dalam proses penemuan, pemahaman yang terbentuk akan lebih kokoh, tahan lama, dan mudah diaplikasikan pada konteks yang berbeda.

IV. PENDEKATAN PEMBELAJARAN

Pendekatan Saintifik (Scientific Approach)

Pendekatan Saintifik akan diintegrasikan dalam setiap tahapan Discovery Learning. Pendekatan ini menekankan pada proses ilmiah yang meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Melalui pendekatan ini, peserta didik dilatih untuk berpikir logis, sistematis, dan objektif dalam mengkaji materi Pemisahan Kekuasaan. Mereka tidak hanya belajar tentang apa itu Trias Politika, tetapi juga bagaimana para pemikir menemukan dan mengembangkan gagasan tersebut, serta bagaimana gagasan tersebut diadaptasi dan diterapkan dalam konteks Indonesia. Ini akan membantu peserta didik membangun kerangka pengetahuan yang kuat dan terstruktur.

V. METODE PEMBELAJARAN

Diskusi Kelompok, Tanya Jawab, Presentasi, Studi Kasus, Analisis Dokumen (Konstitusi dan Artikel Berita).

Metode-metode ini dipilih untuk mendukung model Discovery Learning dan pendekatan Saintifik. Diskusi kelompok memungkinkan kolaborasi dan pertukaran ide, memperkaya perspektif peserta didik. Tanya jawab memfasilitasi klarifikasi konsep dan stimulasi pemikiran. Presentasi melatih kemampuan komunikasi dan sintesis informasi. Studi kasus dan analisis dokumen adalah

metode krusial untuk Pembelajaran Mendalam, karena mendorong peserta didik untuk menerapkan konsep teoretis pada situasi nyata, menganalisis data konkret, dan menarik kesimpulan yang berbasis bukti. Metode-metode ini secara kolektif akan menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, partisipatif, dan merangsang pemikiran tingkat tinggi.

VI. MEDIA PEMBELAJARAN

- A. Teks Konstitusi (UUD NRI Tahun 1945)
- B. Artikel berita atau kliping koran daring/cetak mengenai isu-isu terkait hubungan antar lembaga negara di Indonesia (misalnya, proses legislasi, judicial review, impeachment, kebijakan pemerintah).
- C. Infografis atau bagan struktur lembaga negara Indonesia.
- D. Video dokumenter singkat tentang sejarah atau praktik pemisahan kekuasaan di negara-negara demokrasi.
- E. Papan tulis/Whiteboard dan spidol.
- F. Laptop dan proyektor.
- G. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).

VII. SUMBER BELAJAR

- A. Buku Teks Pendidikan Pancasila Kelas XI SMA.
- B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (naskah asli dan amandemen).
- C. Jurnal ilmiah atau artikel populer tentang ilmu pemerintahan dan hukum tata negara.
- D. Sumber daring terpercaya (misalnya, situs resmi MPR, DPR, MA, MK, BPK, situs berita nasional yang kredibel).
- E. Buku-buku referensi tentang teori negara dan demokrasi.

VIII. PEMAHAMAN BERMAKNA

Pembelajaran tentang Pemisahan Kekuasaan (Trias Politika Modifikasi) ini memiliki makna yang sangat mendalam bagi peserta didik. Pemahaman ini bukan hanya sekadar pengetahuan tentang struktur pemerintahan, melainkan fondasi untuk memahami bagaimana sebuah negara demokratis bekerja dan menjaga dirinya dari tirani. Peserta didik akan memahami bahwa pemisahan kekuasaan adalah mekanisme vital untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu tangan atau satu lembaga, yang seringkali menjadi cikal bakal otoritarianisme dan pelanggaran hak asasi manusia.

Melalui materi ini, peserta didik akan menyadari bahwa konsep "Trias Politika Modifikasi" di Indonesia mencerminkan kearifan lokal dan adaptasi terhadap realitas politik dan sosial bangsa. Ini bukan sekadar meniru model Barat secara mentah, melainkan mengembangkan sistem yang unik dengan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan antarlembaga (checks and balances) yang sangat kuat. Pemahaman ini akan membentuk kesadaran bahwa setiap warga negara memiliki peran untuk mengawal dan memastikan bahwa praktik

pemisahan kekuasaan berjalan sesuai dengan amanat konstitusi dan cita-cita Pancasila.

Dengan demikian, peserta didik akan tumbuh menjadi warga negara yang literat secara politik, kritis terhadap kebijakan publik, dan mampu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Mereka akan melihat bahwa demokrasi bukanlah sekadar prosedur pemilihan umum, tetapi sebuah sistem yang kompleks dan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjamin hak-hak fundamental warga negara.

IX. PERTANYAAN PEMANTIK

- A. "Mengapa dalam sebuah negara yang menganut demokrasi, kekuasaan tidak boleh dipegang oleh satu orang atau satu lembaga saja? Apa bahayanya jika hal itu terjadi?"
- B. "Apakah kalian pernah mendengar istilah 'Trias Politika'? Apa yang kalian ketahui tentang konsep tersebut, dan mengapa konsep itu dianggap penting bagi sebuah negara?"
- C. "Menurut pengamatan kalian, bagaimana cara kerja pemerintah di Indonesia? Apakah semua keputusan penting dibuat oleh presiden sendirian, atau ada lembaga lain yang terlibat? Jika ada, apa peran mereka?"
- D. "Bayangkan jika tidak ada lembaga yang mengawasi kekuasaan pemerintah atau DPR. Apa yang mungkin terjadi pada negara kita? Mengapa pengawasan itu penting?"

X. KEGIATAN PEMBELAJARAN

A. PERTEMUAN PERTAMA (2 x 45 menit)

Materi: Konsep Dasar Pemisahan Kekuasaan (Trias Politika Klasik dan Perbedaannya dengan Pembagian Kekuasaan)

1. Pendahuluan (15 menit)

- a. Guru memasuki ruang kelas dengan senyum dan sapaan hangat, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Guru mengucapkan salam, menanyakan kabar peserta didik, dan mengajak mereka untuk mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk pelajaran hari ini. Guru memastikan kebersihan dan kerapian kelas sebagai bagian dari lingkungan belajar yang positif.
- b. Guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa bersama, sebagai bentuk penanaman nilai religius dan spiritual sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Setelah itu, guru

- melakukan presensi untuk memastikan kehadiran seluruh peserta didik.
- c. Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang telah disiapkan. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk menggali pemahaman awal peserta didik tentang konsep kekuasaan dan pentingnya pembatasan kekuasaan dalam sebuah negara. Misalnya, "Menurut kalian, apa yang terjadi jika semua kekuasaan di sebuah negara hanya dipegang oleh satu orang atau satu kelompok saja? Apa dampak yang mungkin timbul bagi rakyatnya?" Guru memberikan kesempatan kepada beberapa peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya, mendorong diskusi singkat, dan mengaitkan jawaban mereka dengan materi yang akan dipelajari.
 - d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pertemuan ini, yaitu menganalisis konsep dasar pemisahan kekuasaan dan perbedaannya dengan pembagian kekuasaan. Guru menjelaskan bahwa pemahaman ini sangat penting sebagai fondasi untuk memahami sistem pemerintahan yang demokratis, khususnya di Indonesia. Guru juga menjelaskan bahwa pada pertemuan ini, peserta didik akan belajar secara aktif melalui model Discovery Learning, yang akan menuntut mereka untuk mencari tahu dan menemukan sendiri konsep-konsep kunci.
 - e. Guru menginformasikan garis besar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, termasuk pembagian kelompok, kegiatan diskusi, dan presentasi. Ini bertujuan agar peserta didik memiliki gambaran yang jelas mengenai alur pembelajaran dan dapat mempersiapkan diri dengan baik.

2. Kegiatan Inti (60 menit)

Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning

- a. Pemberian Rangsangan (Stimulation) (10 menit)
 - i. Guru menampilkan sebuah video pendek atau infografis yang menggambarkan praktik kekuasaan absolut atau tirani dalam sejarah (misalnya, cuplikan film sejarah, atau ilustrasi kondisi negara tanpa pembatasan kekuasaan). Video atau infografis ini dipilih untuk memicu rasa ingin tahu dan keprihatinan peserta didik tentang dampak negatif dari kekuasaan yang tidak terbatas.
 - ii. Setelah tayangan, guru memancing reaksi peserta didik dengan pertanyaan seperti, "Apa perasaan kalian setelah melihat tayangan tadi? Mengapa kekuasaan yang tidak terbatas itu berbahaya? Bagaimana menurut kalian cara mencegah agar hal serupa tidak terjadi di sebuah negara?"
 - iii. Guru kemudian memperkenalkan secara singkat bahwa para pemikir di masa lalu juga menghadapi masalah yang sama dan mencoba mencari solusi, salah satunya melalui gagasan pemisahan kekuasaan. Guru menyebutkan nama John Locke

dan Montesquieu sebagai pionir gagasan tersebut, tanpa menjelaskan terlalu detail, agar peserta didik termotivasi untuk mencari tahu lebih lanjut.

- b. Identifikasi Masalah (Problem Statement) (10 menit)
 - i. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil yang heterogen (4-5 orang per kelompok). Setiap kelompok diminta untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan kunci yang ingin mereka jawab setelah melihat rangsangan dan mendengar pengantar dari guru.
 - ii. Guru memberikan panduan berupa pertanyaan terbuka yang mendorong perumusan masalah, misalnya: "Apa sebenarnya yang dimaksud dengan 'pemisahan kekuasaan' menurut para ahli? Siapa saja pemikir yang mencetuskan ide ini dan bagaimana gagasan mereka? Apa perbedaan mendasar antara pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan?"
 - iii. Setiap kelompok menuliskan minimal tiga pertanyaan identifikasi masalah di lembar kerja yang telah disediakan. Guru berkeliling untuk memastikan setiap kelompok memahami tugas dan dapat merumuskan pertanyaan yang relevan dan menantang.
- c. Pengumpulan Data (Data Collection) (15 menit)
 - i. Setiap kelompok menerima Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang berisi petunjuk untuk mengumpulkan informasi. Guru juga menyediakan berbagai sumber belajar yang relevan, seperti potongan teks dari buku referensi tentang Trias Politika klasik, artikel singkat tentang John Locke dan Montesquieu, serta definisi pemisahan dan pembagian kekuasaan dari berbagai sumber tepercaya.
 - ii. Peserta didik dalam kelompok bersama-sama membaca, menganalisis, dan mencatat informasi penting dari sumber-sumber yang diberikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka rumuskan pada tahap identifikasi masalah. Mereka diizinkan untuk menggunakan gawai mereka untuk mencari informasi tambahan di internet, dengan bimbingan guru agar tetap fokus pada topik dan menggunakan sumber yang kredibel.
 - iii. Guru bertindak sebagai fasilitator, membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami teks atau menemukan informasi yang relevan. Guru mengingatkan peserta didik untuk mencatat sumber informasi yang mereka gunakan.
- d. Pengolahan Data (Data Processing) (10 menit)
 - i. Setelah data terkumpul, setiap kelompok berdiskusi untuk mengolah dan menganalisis informasi yang telah mereka dapatkan. Mereka menyortir, mengklasifikasikan, dan

- menginterpretasikan data untuk menemukan pola atau hubungan antar konsep.
- ii. Secara khusus, kelompok diminta untuk membandingkan gagasan pemisahan kekuasaan oleh John Locke dan Montesquieu. Mereka juga harus mengidentifikasi poin-poin perbedaan antara konsep "pemisahan kekuasaan" murni dan "pembagian kekuasaan" sebagai dua pendekatan yang berbeda dalam mengatur distribusi kekuasaan negara.
 - iii. Hasil pengolahan data ini kemudian dirangkum dalam bentuk poin-poin penting atau mind map di LKPD mereka. Guru memantau proses diskusi dan pengolahan data, memberikan arahan jika ada kelompok yang melenceng atau kesulitan dalam menginterpretasikan informasi.
- e. Pembuktian (Verification) (10 menit)
- i. Beberapa kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil pengolahan data mereka di depan kelas. Setiap kelompok memaparkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan identifikasi masalah mereka, menjelaskan konsep Trias Politika klasik, serta perbedaan antara pemisahan dan pembagian kekuasaan.
 - ii. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi, mengajukan pertanyaan, atau memberikan tambahan informasi. Guru memimpin sesi tanya jawab ini, memastikan bahwa semua konsep kunci telah dibahas dan terverifikasi kebenarannya berdasarkan sumber-sumber yang ada.
 - iii. Guru memberikan klarifikasi dan penguatan jika ada miskonsepsi, serta meluruskan pemahaman yang kurang tepat. Guru menekankan bahwa Trias Politika pada awalnya adalah konsep idealis yang kemudian mengalami banyak modifikasi dalam praktiknya.
- f. Menarik Kesimpulan (Generalization) (5 menit)
- i. Guru membimbing peserta didik secara klasikal untuk merumuskan kesimpulan umum tentang pemisahan kekuasaan. Kesimpulan ini mencakup definisi Trias Politika klasik, pentingnya gagasan ini dalam mencegah tirani, serta perbedaan esensial antara pemisahan dan pembagian kekuasaan.
 - ii. Peserta didik mencatat kesimpulan penting ini di buku catatan mereka. Guru memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki pemahaman yang solid mengenai konsep-konsep dasar ini sebagai bekal untuk pertemuan selanjutnya.

3. Penutup (15 menit)

- a. Guru memberikan penguatan terhadap materi yang telah dipelajari hari ini, menekankan kembali pentingnya pemahaman konsep dasar pemisahan kekuasaan sebagai fondasi negara demokratis. Guru

- juga mengapresiasi partisipasi aktif seluruh peserta didik selama kegiatan pembelajaran.
- b. Guru meminta beberapa peserta didik untuk menyampaikan refleksi singkat tentang pembelajaran hari ini, seperti "Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Apa bagian yang paling menarik? Apakah ada hal yang masih membuat kalian bingung?" Refleksi ini membantu guru mengukur tingkat pemahaman dan keterlibatan peserta didik.
 - c. Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, yaitu menganalisis praktik pemisahan kekuasaan yang dimodifikasi di Indonesia. Guru memberikan tugas mandiri berupa membaca dan mencari informasi awal tentang struktur lembaga negara di Indonesia (MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, BPK). Tugas ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar lebih siap menghadapi materi selanjutnya.
 - d. Guru menutup pelajaran dengan memberikan motivasi dan pesan moral terkait pentingnya menjadi warga negara yang cerdas dan kritis. Guru mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerja sama peserta didik, kemudian memimpin doa penutup, dan mengucapkan salam.

B. PERTEMUAN KEDUA (2 x 45 menit)

Materi: Praktik Pemisahan Kekuasaan (Trias Politika Modifikasi) di Indonesia

1. Pendahuluan (15 menit)

- a. Guru menyambut peserta didik dengan antusiasme, menciptakan atmosfer yang positif dan energik. Guru memastikan bahwa semua peserta didik siap untuk melanjutkan pembelajaran dengan semangat yang sama seperti pertemuan sebelumnya.
- b. Guru membuka pelajaran dengan memimpin doa dan melakukan presensi. Guru juga secara singkat mengingatkan kembali tata tertib kelas dan harapan untuk partisipasi aktif selama pembelajaran.
- c. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi pertemuan sebelumnya dengan materi hari ini. Guru dapat memulai dengan pertanyaan seperti, "Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep dasar Trias Politika. Nah, menurut kalian, apakah konsep murni Trias Politika itu bisa diterapkan secara utuh di semua negara, termasuk Indonesia? Mengapa ya atau mengapa tidak?" Pertanyaan ini dirancang untuk memancing pemikiran kritis peserta didik tentang adaptasi konsep.
- d. Guru secara singkat mereview poin-poin penting dari pertemuan pertama, khususnya tentang perbedaan pemisahan kekuasaan murni dan pembagian kekuasaan. Guru kemudian menjelaskan bahwa di Indonesia, kita menerapkan konsep "Trias Politika Modifikasi" atau sering disebut juga "pembagian kekuasaan" dengan mekanisme checks and balances yang kuat.

- e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, yaitu menganalisis praktik pemisahan kekuasaan yang dimodifikasi di Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, serta mengidentifikasi peran dan fungsi lembaga-lembaga negara dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Guru kembali menekankan bahwa pembelajaran akan dilakukan secara aktif melalui Discovery Learning dan akan sangat menuntut peserta didik untuk berpikir kritis.
- f. Guru menginformasikan kembali garis besar kegiatan pembelajaran yang akan melibatkan analisis dokumen UUD NRI Tahun 1945, diskusi kelompok, dan presentasi.

2. Kegiatan Inti (60 menit)

Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning

- a. Pemberian Rangsangan (Stimulation) (10 menit)
 - i. Guru menayangkan beberapa klip berita atau artikel daring yang menggambarkan interaksi atau potensi konflik antarlembaga negara di Indonesia (misalnya, DPR mengkritik kebijakan pemerintah, MK membatalkan undang-undang, BPK menemukan penyimpangan anggaran, Presiden melakukan reshuffle kabinet). Kliping ini sengaja dipilih untuk menunjukkan dinamika dan kompleksitas hubungan antarlembaga.
 - ii. Guru meminta peserta didik untuk mengamati klip tersebut dan bertanya, "Apa yang kalian lihat dari berita-berita ini? Mengapa lembaga-lembaga negara ini bisa saling mengkritik atau bahkan membatalkan keputusan satu sama lain? Apakah ini berarti tidak ada kerja sama?" Pertanyaan ini bertujuan untuk merangsang pemikiran tentang mekanisme checks and balances.
 - iii. Guru menjelaskan bahwa fenomena ini adalah bagian dari praktik "Trias Politika Modifikasi" di Indonesia, di mana ada pemisahan fungsi tetapi juga ada mekanisme saling mengawasi dan menyeimbangkan.
- b. Identifikasi Masalah (Problem Statement) (10 menit)
 - i. Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil yang sama seperti pertemuan sebelumnya atau membentuk kelompok baru jika dirasa perlu. Setiap kelompok menerima LKPD yang berisi tugas untuk merumuskan masalah.
 - ii. Guru memberikan panduan pertanyaan terbuka, misalnya: "Bagaimana UUD NRI Tahun 1945 mengatur pemisahan atau pembagian kekuasaan di Indonesia? Lembaga-lembaga negara apa saja yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Bagaimana mekanisme 'checks and balances' antar lembaga-lembaga tersebut bekerja dalam praktik pemerintahan di Indonesia?"

- iii. Setiap kelompok menuliskan minimal tiga pertanyaan identifikasi masalah yang spesifik tentang praktik pemisahan kekuasaan di Indonesia. Guru memastikan pertanyaan-pertanyaan ini relevan dengan tujuan pembelajaran.
- c. Pengumpulan Data (Data Collection) (15 menit)
 - i. Setiap kelompok menerima salinan UUD NRI Tahun 1945 (atau diakses melalui gawai), infografis struktur lembaga negara Indonesia, dan beberapa contoh kasus atau skenario singkat yang melibatkan interaksi antarlembaga.
 - ii. Peserta didik dalam kelompok secara aktif menelaah pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan kekuasaan legislatif (DPR, DPD, MPR), eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), dan yudikatif (MA, MK, KY), serta lembaga-lembaga negara lainnya (BPK, KPU). Mereka mencari tahu fungsi, wewenang, dan hubungan antarlembaga tersebut.
 - iii. Peserta didik juga menganalisis infografis dan contoh kasus untuk memahami bagaimana mekanisme checks and balances diimplementasikan dalam praktik. Guru berkeliling, memberikan bimbingan, dan memastikan peserta didik fokus pada pencarian data yang relevan.
 - d. Pengolahan Data (Data Processing) (10 menit)
 - i. Setelah data terkumpul, setiap kelompok berdiskusi untuk mengolah dan menganalisis informasi yang telah mereka dapatkan. Mereka menyusun daftar lembaga negara beserta fungsi utamanya, kemudian memetakan hubungan antarlembaga tersebut, khususnya dalam konteks mekanisme checks and balances.
 - ii. Kelompok diminta untuk mengidentifikasi setidaknya dua contoh konkret bagaimana satu lembaga mengawasi atau menyeimbangkan kekuasaan lembaga lain berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 atau kasus nyata yang mereka temukan. Misalnya, bagaimana DPR mengawasi pemerintah, bagaimana MK menguji undang-undang yang dibuat DPR dan Presiden, atau bagaimana BPK memeriksa keuangan negara.
 - iii. Hasil pengolahan data ini kemudian dirangkum dalam bentuk tabel, bagan, atau poin-poin penting di LKPD. Guru memantau, memberikan masukan, dan memastikan analisis yang dilakukan mendalam.
 - e. Pembuktian (Verification) (10 menit)
 - i. Beberapa kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil analisis mereka di depan kelas. Mereka menjelaskan bagaimana Trias Politika dimodifikasi di Indonesia, menguraikan fungsi lembaga-lembaga negara, dan memberikan contoh nyata mekanisme checks and balances.

- ii. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi, mengajukan pertanyaan, atau memberikan contoh lain. Sesi ini menjadi ajang verifikasi pemahaman, di mana guru dan peserta didik secara kolektif menguji keakuratan dan kelengkapan informasi yang disampaikan.
 - iii. Guru memberikan penguatan dan klarifikasi, khususnya mengenai kompleksitas sistem ketatanegaraan Indonesia yang tidak sepenuhnya menganut pemisahan kekuasaan murni ala Montesquieu, melainkan lebih pada pembagian kekuasaan dengan penekanan pada keseimbangan dan kontrol timbal balik antarlembaga. Guru juga dapat menyoroti peran lembaga-lembaga independen lain yang mendukung sistem ini.
- f. Menarik Kesimpulan (Generalization) (5 menit)
- i. Guru membimbing peserta didik secara klasikal untuk merumuskan kesimpulan umum tentang praktik Trias Politika Modifikasi di Indonesia. Kesimpulan ini harus mencakup pemahaman bahwa kekuasaan negara di Indonesia didistribusikan kepada berbagai lembaga dengan fungsi yang jelas, namun juga saling mengawasi dan menyeimbangkan (checks and balances) demi mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
 - ii. Peserta didik mencatat kesimpulan ini di buku catatan mereka. Guru memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana sistem ini beroperasi di negara kita.

3. Penutup (15 menit)

- a. Guru memberikan penguatan akhir terhadap seluruh materi yang telah dipelajari selama dua pertemuan, menyimpulkan bahwa pemisahan kekuasaan adalah prinsip fundamental demokrasi yang diadaptasi secara unik di Indonesia untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang stabil dan akuntabel. Guru juga mengapresiasi kerja keras dan partisipasi aktif seluruh peserta didik.
- b. Guru meminta peserta didik untuk melakukan refleksi secara tertulis atau lisan mengenai pembelajaran secara keseluruhan. Pertanyaan refleksi dapat berupa: "Apa pelajaran paling berharga yang kalian dapatkan dari materi Pemisahan Kekuasaan ini? Bagaimana pemahaman ini mengubah cara pandang kalian terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara? Apa peran kita sebagai warga negara dalam mengawal praktik pemisahan kekuasaan?"
- c. Guru memberikan penugasan mandiri atau proyek kecil, misalnya mencari dan menganalisis satu isu aktual di Indonesia yang berkaitan dengan hubungan antarlembaga negara, dan menyajikannya dalam bentuk esai singkat atau infografis. Tugas ini bertujuan untuk mendalami pemahaman dan aplikasi konsep dalam kehidupan nyata.

- d. Guru menutup pelajaran dengan memberikan motivasi agar peserta didik terus belajar, berpikir kritis, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Guru memimpin doa penutup, mengucapkan terima kasih, dan salam.

XI. ASESMEN (PENILAIAN)

Asesmen dalam pembelajaran ini dirancang untuk mengukur capaian tujuan pembelajaran secara komprehensif, mulai dari pemahaman konsep, kemampuan analisis, hingga pengembangan sikap kritis dan partisipatif. Pendekatan asesmen akan berpusat pada proses (formatif) dan hasil belajar (sumatif), serta memperhatikan aspek diagnostik untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik.

A. Asesmen Diagnostik

Dilakukan pada awal pertemuan pertama untuk memetakan kesiapan belajar dan pengetahuan awal peserta didik.

1. Asesmen Diagnostik Non-Kognitif:

- a. Teknik: Observasi dan Wawancara singkat.
- b. Instrumen: Lembar observasi dan daftar pertanyaan.
- c. Fokus: Mengidentifikasi suasana hati peserta didik, minat belajar terhadap topik pemerintahan, gaya belajar, dan tantangan yang mungkin dihadapi. Contoh pertanyaan: "Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apa yang kalian harapkan dari pelajaran ini? Apakah ada hal yang mengganggu pikiran kalian sebelum belajar?"

2. Asesmen Diagnostik Kognitif:

- a. Teknik: Tes Lisan atau Kuis Singkat.
- b. Instrumen: Pertanyaan terbuka atau pilihan ganda sederhana.
- c. Fokus: Mengukur pengetahuan awal peserta didik tentang konsep dasar kekuasaan, pemerintahan, dan demokrasi. Contoh pertanyaan: "Apa yang kalian pahami tentang 'kekuasaan negara'? Siapa yang menjalankan pemerintahan di Indonesia menurut kalian?"

B. Asesmen Formatif

Dilakukan sepanjang proses pembelajaran untuk memantau kemajuan belajar peserta didik, memberikan umpan balik, dan menyesuaikan strategi pembelajaran.

1. Penilaian Sikap (Profil Pelajar Pancasila):

- a. Teknik: Observasi selama kegiatan diskusi kelompok, presentasi, dan interaksi di kelas.
- b. Instrumen: Lembar observasi dengan rubrik.
- c. Fokus: Mengamati dimensi Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia (misalnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menghargai perbedaan pendapat), Berkebinekaan Global

(menghargai keragaman pandangan), Gotong Royong (bekerja sama dalam kelompok), Mandiri (mencari informasi secara mandiri), Bernalar Kritis (mengajukan pertanyaan, menganalisis informasi), dan Kreatif (menyajikan ide dengan cara baru).

2. Penilaian Pengetahuan:

- a. Teknik: Penilaian kinerja diskusi kelompok, tanya jawab di kelas, dan pengisian Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).
- b. Instrumen: Rubrik penilaian diskusi, daftar pertanyaan lisan, dan lembar LKPD.
- c. Fokus: Mengukur pemahaman peserta didik terhadap konsep Trias Politika klasik, perbedaan pemisahan dan pembagian kekuasaan, serta pemetaan lembaga negara di Indonesia. Guru akan memberikan umpan balik konstruktif secara langsung selama proses ini.

3. Penilaian Keterampilan:

- a. Teknik: Observasi saat pengumpulan data, pengolahan data, dan presentasi hasil diskusi kelompok.
- b. Instrumen: Rubrik penilaian presentasi (meliputi kejelasan penyampaian, kemampuan menjawab pertanyaan, kreativitas, dan kekompakan kelompok) serta rubrik penilaian analisis dokumen (kemampuan mengidentifikasi informasi relevan, menganalisis, dan menyimpulkan).
- c. Fokus: Mengukur kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan mengolah informasi dari berbagai sumber, menganalisis data, serta mengomunikasikan hasil temuan secara efektif.

C. Asesmen Sumatif

Dilakukan setelah seluruh materi Pemisahan Kekuasaan selesai diajarkan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan.

1. Penugasan Mandiri (Proyek):

- a. Teknik: Penugasan proyek individu atau kelompok kecil.
- b. Instrumen: Rubrik penilaian proyek.
- c. Fokus: Menganalisis isu aktual terkait praktik pemisahan kekuasaan di Indonesia, menyajikannya dalam bentuk esai analitis, infografis, atau presentasi singkat. Proyek ini akan mengukur kemampuan peserta didik untuk menerapkan pemahaman konseptual pada konteks nyata, menganalisis secara kritis, dan menyajikan argumen yang terstruktur.
- d. Contoh Proyek: "Pilihlah satu berita atau kasus kontemporer